



MENATA ULANG KEBIJAKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN SISTEM DESENTRALISASI BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL BATAM



Tim Peneliti

Dosen:

1. Prof. Dr. Bahrullah Akbar
2. Drs. Zulkarnain Ilyas, MM
3. Dr. M. Zubakhrum Baharuddin Tjenreng
4. Dra. Pratiwi Nurcahyani, M.Si
5. Sutiyo, Ph.D

Praja

1. Valent Breri Sinuraya [NPP. 30.0154] Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, fakultas Politik Pemerintahan
2. Rendy Cahaya Aditama [NPP. 30.1426] Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan
3. Agung Budi Prasetyo [NPP. 30.0639] Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Fakultas Perlindungan Masyarakat



**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2021**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Penelitian.....	8
1.3 Kegunaan Penelitian	8
BAB II. STUDI PUSTAKA	10
2.1 Kelembagaan dalam perspektif Neo Institutional Theory	10
2.2 Desentralisasi.....	20
2.3 Kawasan Ekonomi Khusus	26
2.4 Kawasan Perdagangan Bebas	27
2.5 Tinjauan Normatif Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia.....	28
2.6 Tinjauan Normatif Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ).....	32
BAB III METODE	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.3 Teknik Analisis Data	35
3.4 Jadwal Penelitian.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Wilayah Batam	37
4.2 Tinjauan Historis Kebijakan Pengelolaan Batam.....	44
4.3 Identifikasi Tumpang Tindih Kelembagaan.....	65
4.4 Implikasi Dualisme Kelembagaan bagi Batam	85
4.4.1 Pertumbuhan Ekonomi	86
4.4.2 Investasi	89
4.4.3 Daya Saing Batam Menurun.....	91
4.5 Pokok Penyempurnaan Kelembagaan / Tata Kelola Batam	92

4.5.1 Perbandingan dengan Kawasan Perdagangan Bebas	
Lainnya	92
4.5.2 Pilihan Kebijakan Tata Kelola Batam	104
BAB V PENUTUP	114
5.1 Simpulan.....	114
5.2 Rekomendasi	115
BIBLIOGRAFI	117